

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT
YYK)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Disusun Oleh:

Muchammad David Faishal

(102211021)

**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Drs. Rokhmadi, M. Ag.

Alamat : Jl. Jatiluhur Ngesrep Banyumanik Semarang

Rustam Dahar KA. Harahap, M. Ag.

Jl. Taman Jeruk III Bukit Jatisari Permai A-9 No.7 Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr. Muchammad David Faishal

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muchammad David Faishal

NIM : 102211021

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 68/PID.SUS/2014/PT YYK)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 28 November 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Rokhmadi, M. Ag.

NIP. 1966518 199403 1002

Rustam Dahar KAH., M. Ag.

NIP. 19690723 199803 1005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

Hal: Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamualaikum wr. Wb

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara

Nama : Muhammad David Faishal

NIM : 102211021

Judul : **TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 68/PID.SUS/2014/PT
YYK)**

Maka Nilai Bimbingannya adalah:.....()

Catatan Pembimbing:

.....

.....

Demikian Agar Dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr. Wb

Semarang, 28 November 2015

Pembimbing I

Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 1994031 002



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

Hal: Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum wr. Wb

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara

Nama : Muhammad David Faishal

NIM : 102211021

Judul : **TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 68/PID.SUS/2014/PT
YYK)**

Maka Nilai Bimbingannya adalah:.....()

Catatan Pembimbing:

.....

.....

Demikian Agar Dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr. Wb

Semarang, 28 November 2015

Pembimbing II

Rustam Dahar KAH., M. Ag.
NIP. 19690723 199803 1005

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 November 2015

Deklarator,

Muchammad David Faishal

NIM: 102211021

MOTTO

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٣﴾

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lemah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. (QS Al-Nur: 23)

عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد احد
فوق عشرة اسواط الا فى حد من حدود الله. (رواه مسلم)

Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : “Sesorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.” (Riwayat Muslim).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga membawa berbagai macam dampak negatif salah satunya adalah pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu supaya diketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan yang tercantum dalam pasal 310 ayat 1 sampai dengan 3. Kaitannya dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik berhubungan dengan Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (ITE). Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dll. Hukum pidana Islam memberikan aturan yang mengacu pada Al-Qur'an bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum dan sanksi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian dokumen yang termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka penulis menggunakan pendekatan hukum doktrinal dalam analisis data.

Hasil dari penelitian ini dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengambil putusan Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT. YYK melihat dari segi hukum (*yuridis*) dan non hukum (*non yuridis*). Dari segi hukum (*yuridis*) dilihat berdasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan, yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Dari segi non hukum (*non yuridis*) seperti pertimbangan Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk balas dendam namun untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada terdakwa. Dalam hukum Islam suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi atau hukuman jika telah memenuhi unsur-unsur *jarimah* yang meliputi unsur formil, materiil dan moril. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT. YYK termasuk dalam *Jarimah ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa dalam 2 bentuk, yaitu hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) atau Peringatan dan hukuman denda. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- apabila tidak membayar denda, diganti dengan penjara selama 1 bulan.

PERSEMBAHAN

Tiada sesuatupun yang dapat memberikan rasa bahagia melainkan senyum manis penuh bangga dengan penuh rasa bakti, cinta dan kasih sayang dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ❖ Kedua orang tua penulis, Almarhum Bapak Chaerudin dan Almarhumah Ibu Sri Riwayati yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu, do'a dan kasih sayang. Walaupun pada saat ini Bapak dan Ibu tidak bisa menyaksikan secara langsung tapi penulis yakin Bapak dan Ibu bangga atas apa yang sudah penulis raih.
- ❖ Keluarga besar yang sangat penulis sayangi Mbak Atik, Mbak Irfa, Mbak Heny, Dek Erik, Mas Hanafi, Mas Ari, Mas Agus, dan keponakan-keponakan penulis yang lucu Billah, Alin, Haikal, Alam, Kekey, dan Dico.
- ❖ Keluarga Bapak Dr. Dahlan, Sp.Rad. dan Ibu dr. Oktina, Sp.Rad dan Bapak Munardi, S.T. yang ada di Puspogiwang (Semarang) dan Ibu Sri Supartiyatun, S.Pd. dari Kaliwungu yang selalu memberikan motivasi dan do'a yang tulus.
- ❖ Calon Istri penulis dari Kaliwungu Titik Suprapti, S.Pd. yang setia menemani penulis berjuang menyelesaikan kuliah sampai hari akad nikah setelah wisuda.
- ❖ Segenap Guru SMA UNGGULAN NURUL ISLAMI SEMARANG dan Dosen UIN WALISONGO SEMARANG yang telah memberikan motivasi penulis.
- ❖ PT. JAWA SURYA KENCANA INDAH yang memberikan kebijakan kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah di sela waktu bekerja.
- ❖ Seluruh relasi kerja CV. SARANA MITRA SEJATI, Team Genio Institute, teman-teman SJ A angkatan 2010-2011 dan pembaca yang budiman.

Semoga amal dan Baik mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Yang Maha Kuasa. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih, saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, dan taufik serta inayah-Nya. Seandainya seluruh lautan di bumi dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena tidak akan pernah cukup menuliskan rahmat yang diberikan kepada seluruh makhluk-Nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada sang revolusioner Muhammad Rasulullah SAW, Nabinya seluruh alam. Dengan keteladanan, keberanian dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang telah mengangkat derajat manusia dan bisa kita rasakan buahnya. Skripsi berjudul **“TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 68/PID.SUS/2014/PT YYK)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang dalam penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh mahasiswa.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum dan sekaligus dosen pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran

untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Rustam Dahar K.A. Harahap, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan motivasi dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak M. Harun, S. Ag, M.H sebagai dosen wali penulis yang turut memberi masukan dan arahan selama belajar di kampus.
6. Kedua orang tua penulis, Almarhum Bapak Chaerudin dan Almarhumah Ibu Sri Riwayati yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu, do'a dan kasih sayang.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang mengajarkan arti kehidupan, kesederhanaan dan kerendahan hati untuk penulis agar mengikhlaskan segala yang telah diperjuangkan untuk menjadi *insan paripurna* yang selalu mengalirkan *inner powernya* ditiap gerak penulis.

Penulis berdo'a semoga semua amal dan jasa baik dari semua pihak dapat pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan yang ideal, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dalam berkarya dikemudian hari. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis berdo'a, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya dan mendapat ridho dari-Nya. Aamiin. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Semarang, 30 November 2015

Penulis

Muchammad David Faishal

NIM: 102211021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II : LANDASAN TEORI PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik	19
1. Definisi Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik	19
2. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik	24
3. Macam-macam Pencemaran Nama Baik	26
B. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam	28

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR
68/PID.SUS/2014/PT YYKTENTANG PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

A. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Yogyakarta	40
1. Sejarah Pengadilan Tinggi Yogyakarta	40
2. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta	41
3. Visi dan Misi	
a. Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	42
b. Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	42
4. Tugas dan Wewenang Hakim	43
B. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 68/PID.SUS/2014/PT YYK	46

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR: 68/PID.SUS/2014/PT YYK TENTANG PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum dan Sanksi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik menurut Hukum Islam.	52
B. Analisis Dasar pertimbangan Hukum dan Sanksi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik menurut Hukum Islam.....	65

BAB V : PENUTUP

A. SIMPULAN	77
B. SARAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari suatu informasi baru dapat diketahui apabila sudah tersebar melalui media, sehingga masyarakat dapat membaca, melihat atau mengaksesnya. Media massa sebagai media yang menunjang komunikasi massa terbagi atas dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik, namun akhir-akhir ini media elektroniklah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pengertian dari media elektronik sendiri adalah media yang meliputi radio, televisi dan internet. Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam media elektronik yang semakin tinggi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui transaksi elektronik. Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.¹

¹ Dian Suci Anggraeni, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media elektronik (Studi Kasus Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar: 2015, hlm. 46-47.

Salah satu jenis media elektronik yang digunakan hampir semua kalangan adalah media sosial. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Blog, Twitter, Facebook dan Wikipedia. Definisi lain dari Media sosial juga di jelaskan oleh Antony Mayfield (2008), menurutnya media sosial adalah media dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds.²

Perkembangan media elektronik tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga membawa berbagai macam dampak negatif. Banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media elektronik, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan yang dilatarbelakangi pengenalan di media sosial dan juga kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dari masalah-masalah di atas, kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang akhir-akhir ini paling sering terjadi. Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers tercatat 107 kasus pencemaran nama baik di Indonesia hingga 2015 dan ada kemungkinan fakta di lapangan lebih besar dari data tersebut.³

² Lihat di http://prezi.com/vddmcub_-ss_/sosial-media-definisi-fungsi-karakteristik/ diakses pada tanggal 2 Agustus 2015 pukul 18.00 WIB.

³Vandi Syahputra, "*Stop Bungkam Kelompok Kritis*", <http://www.koran.padek.co/read/detail/36265.html> diakses pada tanggal 16 November 2015 Pukul 07.55 WIB.

Pelaku kasus pencemaran nama baik bisa berasal dari orang terdekat korban, seperti seorang istri yang terlibat dalam pencemaran nama baik suaminya. Ketika seorang istri atau suami melupakan tanggung jawabnya untuk menjaga kehormatan dan harga diri pasangannya, akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan puncaknya terjadi perceraian. Bahkan pihak yang merasa harga dirinya dihinakan dapat menempuh jalur hukum karena pada dasarnya dalam hidup ini setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga.

Hukum Islam sebagai *rahmatan lil'alam*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia dan mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya.⁴ Misalnya bagaimana Islam mengatur tentang masalah penghinaan yang jelas-jelas Islam melarangnya. Islam mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang fasik. Allah berfirman dalam QS. Al-Qalam: 10-12, QS. Al-Humazah: 1 dan QS. Al-Hujurat : 12;

وَلَا تُطْعَمُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

⁴ Musthafa Al-'Adawi. *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'minin* Terj. Salim Bazemool, Taufik Damas. Muhammad Arifyanto, Jakarta: PT. Alma'arif, 2005, hlm. 502.

Artinya : Dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina.(10) Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,(11) Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, (12). (QS. al-Qalam: 10-12)⁵

Dalam firman Allah lainnya yaitu pada QS. Al-Humazah: 1

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

Artinya : Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela. (QS. Al-Humazah: 1) ⁶

Dalam firman Allah lainnya yaitu pada QS. Al- Hujurat: 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al- Hujurat: 12)⁷

Yusuf Qardawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.⁸ Yang dimaksud menghina adalah menganggap hina derajat orang lain, meremehkan atau mengingatkan cela dan kekurangan-kekurangan dengan cara yang dapat menyebabkan ketawa.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Atlas, 1998, hlm. 1218.

⁶ Ibid, hlm. 1361.

⁷ Ibid, hlm. 1091

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid . Jakarta: Rabbani Press, 2000, hlm. 372.

Bentuk-bentuk penghinaan adalah bermacam-macam yang pokok ialah ditujukan untuk merendahkan kedudukan orang lain dan mempermalukan orang yang dihina tersebut. Menghina, menghasut maupun mengumpat adalah tindakan yang jelek, karena dengan menghina berarti menghancurkan orang lain dan merendahkan derajatnya.

Dari penjelasan diatas bahwasannya Islam sangat menghormati kehormatan setiap orang dengan diharamkannya perbuatan menghina, mencaci, mengolok-olok yang dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik sehingga seseorang merasa direndahkan kehormatannya di hadapan orang lain. Tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana Islam termasuk *jarimah ta'zir*, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at.⁹ Artinya tindak pidana yang termasuk *jarimah takzir* adalah perbuatan yang diberi hukuman bersifat pendidikan atas perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at .

Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu mmenjadi diketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam pasal 310 ayat 1 sampai dengan 3. Peristiwa pidana yang merupakan penghinaan adalah

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 299.

perbuatan fitnah yang menjatuhkan kedudukan, martabat dan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum. Perbuatan penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Bab XVI, Buku II pasal 310 ayat 1 bahwa : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.¹⁰

Sebuah kasus tentang pencemaran nama baik terjadi di Yogyakarta. Seorang suami bernama Yana Karyana (selanjutnya disebut pelapor atau saksi korban) melaporkan seorang laki-laki lain bernama Tommy Virgananda (selanjutnya disebut terdakwa) atas tindakan pencemaran nama baik. Kasus bermula saat Tommy Virgananda mencantumkan status hubungan menikah dengan seorang wanita bernama Hilda Puspita (selanjutnya disebut saksi) yang tak lain adalah istri sah pelapor. Hal ini bisa dikategorikan sebagai pembohongan publik, karena faktanya terlapor bukan suami dari saksi Hilda Puspita.

Dalam hukum Islam kasus ini bisa dikategorikan sebagai *Qadzaf*. *Qadzaf* (قذف) secara bahasa artinya melempar/melontar, sedangkan menurut istilah qadzaf adalah menuduh orang baik-baik berbuat zina dengan tuduhan

¹⁰ Moeljatno, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*” . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, hlm.114

secara terang-terangan. Menuduh dalam arti melemparkan sangkaan kepada seseorang tanpa dikuatkan bukti-bukti yang nyata.¹¹ Allah berfirman dalam QS. Al-Nur : 23

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lemah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. (QS Al-Nur: 23).¹²

Hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah didera sebanyak 80 kali, Jika yang menuduh orang merdeka.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al- Nur: 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh) 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasiq”.(QS. Al-Nur : 4).¹³

Sedangkan jika yang menuduh hamba sahaya (budak) maka hukumannya didera atau dijilid 40 kali. Firman Allah QS. Al-Nisa' : 25

فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

¹¹ Dilihat dari dewijiforever.blogspot.com/2011/09/hukum-qadzaf.html. diakses pada 25 April 2015 pukul 16.35 WIB.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.cit, hlm. 715.

¹³ Ibid, hlm. 711.

Artinya : Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa': 25).¹⁴

Dalam kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Tommy Virgananda ini walaupun terdapat unsur *Qazdaf*, namun ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, yakni memberikan kesaksian dari 4 orang saksi, sehingga kasus ini lebih tepatnya masuk kedalam jarimah *ta'zir*. Selain itu Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :

عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. (رواه مسلم)

Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : “Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.” (Riwayat Muslim).¹⁵

Hadits ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Perkataan “karena suatu tuduhan” itu menunjukkan bahwa penahanan itu disamping ada yang berstatus sebagai hukuman, juga sebagai membersihkan diri.

Selain itu berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik ini Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al Nisa: 91 sebagai berikut;

¹⁴ Ibid, hlm. 158.

¹⁵ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz IX, PT.Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 202.

سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا مَا رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَّمْ يَعْتَزْلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَاخْذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٩١﴾

Artinya: Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman dari pada kamu dan aman (pula) dari kaumnya. setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), merekapun terjun kedalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), Maka tawanlah mereka dan Bunuhlah mereka dan merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka.(QS. Al Nisa: 91)¹⁶

Allah SWT memerintahkan untuk mencegah fitnah sebagaimana dalam

QS. Al-Anfaal: 39 sebagai berikut;

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِذَا انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan cegahlah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah, jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-Anfaal: 39).¹⁷

Kasus ini sebelumnya ditangani di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dilakukan banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Sidang Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK menyatakan Tommy Virgananda bersalah dan di pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar 1 Juta Rupiah. Tommy Virgananda terbukti

¹⁶ Ibid, hlm 179

¹⁷ Ibid, hlm 576

melanggar pasal 45 ayat 1 (Jo) pasal 27 ayat 3 UU RI No 11 tahun 2008¹⁸ tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (ITE) jo pasal 55 ayat 1 KUHP.¹⁹

Berawal dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik, dalam hal ini studi kasus pada putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang pencemaran nama baik. Penulis akan menganalisis putusan tersebut menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam yang akan penulis realisasikan dalam skripsi dengan judul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK)”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dan sanksi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik?

¹⁸ Pasal 27 ayat 3 berbunyi “(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” *Juncto* Pasal 45 ayat 1(1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

¹⁹ Pasal 55 ayat 1 KUHP berbunyi (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dan sanksi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT. YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT. YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik.

Adapun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan

hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kejahatan yang mencemarkan nama baik seseorang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang pencemaran nama baik sebelumnya telah ada yang melakukan, antara lain:

Skripsi saudara Ahmad Azani Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang NIM: 07221104 dengan judul "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/ PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik*". Dalam skripsi tersebut membahas tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Sudarmi terhadap saksi korban Rih Lasmiatiek dengan melakukan umpatan dan kata-kata kasar. Dalam Kasus ini hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat kepada Sudarmi, Hakim Pengadilan Negeri Semarang melihat dari segi hukum (*yuridis*) yaitu didasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan, di samping itu juga mempertimbangkan segi non hukum (*non yuridis*) seperti faktor dari terdakwa serta dari unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan kata lain sesuai dengan

keyakinan dan pengamatan hakim. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis buat adalah bentuk dari pencemaran nama baik dalam skripsi ini berupa umpatan secara langsung sedangkan dalam penelitian penulis bentuk pencemaran nama baik melalui media elektronik, sehingga selain berhubungan dengan KUHP juga berhubungan dengan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (ITE).²⁰

Skripsi karya Arifin yang berjudul “ *Pencemaran Nama Baik menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*” meguraikan secara rinci bagaimana perbandingan pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Namun dalam skripsi ini belum diuraikan bagaimana penyidikan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik dan hanya menitikberatkan pada perbandingan pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.²¹

Skripsi saudara A. Vebriyanti Rasyid mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin berjudul “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks)*”. Skripsi ini membahas pencemaran nama baik yang dilakukan Drs. Patrice Lumumba, MA dengan saksi korban Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, Msi. Terdakwa membuat surat Nomor: 488/H.4.1.3/UM.15.2010 tanggal 25 Januari 2010 yang ditujukan kepada Rektorat UNHAS serta 9 (Sembilan) alamat tembusan yang mana isi surat tersebut terdakwa menuliskan tentang hinaan dan makian terhadap saksi

²⁰ Ahmad Azani, “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2012.

²¹ Arifin, “ *Pencemaran Nama Baik menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2009.

korban yang antara lain mengatakan bahwa saksi korban “menjijikkan, buta hati, bejat, keji, tidak bermoral dan tukang fitnah”, kemudian surat tersebut terdakwa kirimkan ke Rektor UNHAS serta masing-masing alamat tembusannya, sehingga surat tersebut banyak yang telah membacanya, padahal apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasa harga dirinya diinjak-injak serta merasa malu dan nama baiknya telah dicemarkan oleh terdakwa, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang. Terdakwa terbukti dan dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis buat adalah bentuk dari pencemaran nama baik dalam skripsi ini berupa tulisan berbentuk fisik (surat edaran) sedangkan dalam penelitian penulis, bentuk pencemaran nama baik melalui media elektronik, sehingga selain berhubungan dengan KUHP juga berhubungan dengan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (ITE). Penulis juga membahas pencemaran nama baik menurut hukum Islam, namun dalam skripsi ini hanya berdasar pada hukum positif saja.²²

E. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

²² A. Vebriyanti Rasyid, “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar: 2013.

Penelitian ini merupakan penelitian dokumen yang termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan, yakni berupa dokumen putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK.

2. Pendekatan Penelitian

Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka penulis menggunakan pendekatan hukum doktrinal dalam analisis data. Maksud pendekatan hukum doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.²³ Menurut Bambang S, apa yang dimaksud dengan doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.²⁴

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁵ Sumber data ini diperoleh dari putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 87.

²⁴ Ibid, hlm. 91.

²⁵ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁶ Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut contohnya adalah peraturan perundang-undangan yakni KUHP, serta bahan kepustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

4. Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁷ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁸ Teknik penalaran berfikir yang digunakan adalah deduktif-induktif. Deduktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

²⁶ Ibid, hlm. 91.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 103.

²⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

Sedangkan induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan²⁹ sehingga akan diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai tinjauan hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Tindak Pencemaran nama baik melalui media elektronik.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II: Landasan Teori Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik yang terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik, meliputi Definisi pencemaran nama baik melalui media elektronik, unsur-unsur pencemaran nama baik serta macam-macam pencemaran nama baik. Sub bab kedua Serta menjelaskan pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam perspektif Hukum Islam.

Bab III: Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang meliputi sejarah lahirnya Pengadilan

²⁹ Bambang S, *Op.cit*, hlm. 117.

Tinggi Yogyakarta, Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Visi dan Misi, Tugas dan wewenang Hakim. Sub bab kedua putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor:68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik.

Bab IV: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik Bab ini terdiri dari 2 sub bab . Sub bab pertama Analisis dasar pertimbangan hukum dan sanksi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik. Sub bab kedua Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik.

Bab V: Penutup yang terdiri dari ; Simpulan dan Saran-saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELETRONIK

1. Definisi Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia sampai saat ini, belum ada definisi yang baku. Hal ini berbeda dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan dalam beberapa istilah, antara lain sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*).¹ Namun dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut.

Di Indonesia, R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak *hate speech* biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu:²

- a) Menista secara lisan (*smaad*)
- b) Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*)
- c) Memfitnah (*laster*)

¹ John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

² Diambil dari [wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian](https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian), pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 07.30 WIB.

- d) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)
- e) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)
- f) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan (*klach delict*) merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/ korban/ orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.³

Dalam ilmu hukum pidana delik aduan ini ada dua macam, yaitu : *Pertama*, Delik Aduan absolute (*absolute klacht delict*). *Dua*, delik aduan relative (*relatieve klacht delict*). Delik aduan absolute (*absolute klacht delict*) merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik

³ Sudarto, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 26.

aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan/ *onsplitbaar*.⁴

Ketentuan Dalam KUHP, mengenai delik aduan ini diatur dalam pasal 72-75 KUHP. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebagai berikut :⁵

1. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa
2. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal.
3. Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan.
4. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Pasal-pasal yang mengatur tindakan *hate speech* terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu:⁶

- a. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)
- b. Penginaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)

⁴ Ibid, hlm. 58.

⁵ Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 31.

⁶ Ibid, hlm. 35.

- c. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
- d. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP)

Selain dalam KUHP, penghinaan juga diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1).

Pasal 27 Ayat (3) dinyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Kemudian dalam Pasal 45 Ayat (1):

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).”

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP, Namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut diatas yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Namun di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Menurut

pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009

halaman 89 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI).surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁷

⁷ O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Indonesia Against Injustice, Jakarta: 2010, hlm.131.

2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Unsur-unsur penecemaran nama baik setidaknya terdapat dalam Pasal 310 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- 2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 4.500,-.
- 3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.⁸

Jika di telaah pasal di atas, maka akan dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, di antaranya adalah:

a. Unsur-unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut. Dalam pasal ini, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

1) Menyiarkan dengan lisan

Menyiarkan di sini maksudnya adalah si pelaku tindak pidana menyebar luaskan berita/kabar dengan lisan yang dapat menjatuhkan martabat atau bahkan berisi hinaan terhadap seseorang.

⁸ Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara: Jakarta, 2001, hlm. 33.

2) Mempertunjukkan

Pelaku tindak pidana mempertunjukkan bisa dengan cara bersuara keras yang akan di dengar orang banyak.⁹

b. Unsur-unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subjektif ini terletak pada hati sanubari si pelaku delik. Dalam pasal ini, unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut:

1) Dengan Maksud

Dalam konteks ini, si pelaku delik dalam melaksanakan tindakan terlarangnya di sertai dengan kesengajaan. Atau dengan kata lain, si pelaku tindak pidana melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan disertai dengan niat di dalam hatinya.

2) Melawan Hukum

Si pelaku tindak pidana dengan niatnya melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas melawan hukum. Dalam kasus di sini adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik itu dilakukannya dengan kesengajaan yang berporos pada niat di dalam hatinya.¹⁰

⁹Ahmad Azani, “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2012, hlm. 16.

¹⁰ Ibid, hlm. 20.

3. Macam-macam Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik atau penghinaan menurut penjelasan R. Soesilo terdiri atas 6 (enam) bentuk yakni menista (*smaad*), menista dengan surat (*smaadachrift*), memfitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*), dan tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).¹¹

1. Menista (*smaad*).

Menista (*smaad*) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”

2. Menista dengan surat (*smaadachrift*).

Menista dengan surat (*smaadachrift*) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menyatakan :

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4.500,-.”

3. Memfitnah (*laster*).

Mengenai memfitnah (*laster*), diatur dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan :

¹¹Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995, hlm. 41.

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

4. Penghinaan ringan (*een voudige belediging*).

Mengenai penghinaan ringan (*een voudige belediging*) diatur dalam

Pasal 315 KUHP yang menyatakan:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau dendasebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”

5. Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*).

Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*) diatur dalam Pasal

317 KUHP yang menyatakan :

“(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3.”

6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).

Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*) diatur dalam

Pasal 318 KUHP yang menyatakan :

“(1) Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3.”

B. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam Islam, pencemaran nama baik memiliki pengertian yang berbeda beda. Perbuatan menggunjing, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Allah berfirman QS. Al-Qalam: 10-12;

وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بَنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.” (QS. Al-Qalam: 10-12).¹²

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١٣﴾

Artinya: “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela” (QS. Al-Humazah: 1)¹³

Pengertian pencemaran nama baik dalam hukum Islam memanglah sulit, karena harus mengkonversikan dulu kata pencemaran nama baik dengan kata-kata arabnya, sedangkan kata yang mengandung pencemaran nama baik berbeda-beda atau banyak redaksinya. Menurut Al-Ghazali penghinaan adalah, menghina (merendahkan) orang lain didepan manusia

¹² Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm. 1455.

¹³ Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm. 2031.

atau didepan umum.¹⁴ Macam-macam pencemaran nama baik dalam Islam antara lain:

a. Ghibah

Secara etimologi, berasal dari kata *ghaba-yaghibu* yang artinya adalah mengumpat, menurut Jalaluddin bin Manzur, ini juga berarti fitnah, umpatan, atau gunjingan.¹⁵ Dapat juga diartikan membicarakan keburukan orang lain dibelakangnya atau tanpa sepengetahuan yang dibicarakan. Disisi lain an-Nawawi mendefinisikan *ghibah* adalah mengupat atau menyebut orang lain yang ia tidak suka atau membencinya, terutama dalam hal kehidupannya. Beliau mengatakan bahwa jarang sekali orang yang bisa lepas dari menggunjing orang lain.¹⁶

Secara terminologi atau bahasa, *ghibah* adalah membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya mengenai sifat atau kehidupannya, sedangkan jika ia mendegar maka ia tidak menyukainya. Dan terlebih jika yang dibicarakan tidak terdapat dalam diri yang dibicarakan itu berarti dusta atau mengada-ada dan itu merupakan dosa yang lebih besar dari ghibah itu sendiri. Tidak berbeda dengan definisi yang disebutkan oleh Al Maragi dalam menjelaskan tentang ghibah yaitu menbicarakan kejelekan atau aib

¹⁴ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Mukhatashar Ihya' Ulumuddin*, Cet. 1, Beirut: Muasyasyah Al- kutub, 1990, hlm. 379.

¹⁵ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 203.

¹⁶ An-Nawawi, *Al-Adzkar*, terj. M. Tarsi Hawi, Bandung: Pustaka Ma'arif, 1984, hlm. 809.

orang lain dibelakangnya, dan jika ia mengetahui maka ia tidak suka walaupun yang dibicarakan adalah benar.¹⁷

Berikut dapat disimpulkan beberapa poin tentang definisi ghibah diatas:

1. Membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan yang dibicarakan, baik dengan ucapan, sindiran ataupun dengan isyarat.
2. Membicarakan aib orang lain, walaupun yang dibicarakan adalah benar adanya pada diri yang dibicarakan.
3. Jika yang dibicarakan mengetahui maka ia akan tidak suka aibnya dibicarakan pada orang lain.
4. Hal yang dibicarakan meliputi, kehidupan pribadi, keluarga maupun spiritual seseorang.
5. Karena membicarakan tanpa sepengetahuan yang dibicarakan, ini artinya perbuatan licik dan pasti perbuatan ini mengandung unsur keinginan untuk merusak harga diri, atau kemulyaan seseorang.

b. Fitnah

Kata fitnah adalah bentuk masydar dari kata *fatana-yaftinu-fatnan* atau *fitnatan* yang secara semantik sebagaimana dijelaskan dalam ensiklopedi Al-Qur'an berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi.¹⁸ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan

¹⁷ Abullah bin Jarullah, *Awas Bahaya Lidah*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 18

¹⁸ Hs, Fahrudin, *Ensiklopedi Al Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 739.

orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).¹⁹ Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah: 41;

﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا تَحْزُنَكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا
ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۚ سَمَّعُونَ
لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخِرِينَ لَمْ يَأْتَوْكَ ۖ تُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ
مَوَاضِعِهِ ۚ يَقُولُونَ إِنِ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخَذُّوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَنْ يُرِدِ
اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ
قُلُوبَهُمْ ۚ هُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

Artinya: Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman", padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepadamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah" Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Maidah 41)²⁰

Dengan adanya fitnah ini, maka akan timbul beberapa kerugian diantaranya yaitu:

¹⁹ AW. Munawir, *Op.cit.* hlm. 328.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Atlas, 1998, hlm. 126.

1. Menimbulkan kesengsaraan, baik bagi si pemfitnah maupun bagi yang di fitnah. Menimbulkan keresahan ditengah masyarakat,
2. Merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan,
3. Mencedakakan orang lain,
4. Merugikan orang lain dan diri sendiri,
5. Masuk Neraka (mendapat siksa) dan diancam tidak masuk Syurga.²¹

c. *Qadzaf* (menuduh orang berzina)

Qadzaf menurut bahasa adalah melempar dengan batu atau dengan lainnya.²² Sedangkan menurut istilah adalah menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya²³

Dasar hukum *qadzaf* ini terdapat dalam QS. Al-Nur: 23:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.” (QS. Al-Nur: 23).²⁴

Adapun unsur-unsur *qadzaf* yaitu *pertama*, Menuduh zina atau mengingkari nasab. Maksudnya adalah ucapan yang mengandung

²¹ Ahmad Azani, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2012, hlm. 25.

²² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II, Dar al-Fikr*, Beirut, cet II, 1990, hlm. 372

²³ Abdul Qadir al-Audah, *at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamy*, Juz. II, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, t,th, hlm. 455.

²⁴ Departemen Agama RI, Op.cit. hlm. 123.

tuduhan atau penolakan terhadap tuduhan keturunan, seperti mengatai seseorang telah berbuat zina atau menempelkan predikat pezina kepada seseorang dan tidak mengakui anak atau janin yang lahir atau masih dalam kandungan istrinya. *Kedua* orang yang dituduh harus orang yang muhsan artinya orang yang dituduh itu orang baik-baik bukan seseorang yang biasa berbuat zina, kalau yang dituduh itu pezina, hal itu bukanlah tuduhan tetapi sesuai dengan kenyataannya. *Ketiga*, adanya *i'tikad* jahat, *i'tikad* jahat inilah yang memotivasi perbuatan tersebut untuk mencelakakan orang lain yang tidak berdosa, sehingga tercemar nama baiknya atau celaka karena hukuman dera.²⁵

Mengenai *qadzif* (orang yang menuduh orang lain berzina) ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain: berakal, dewasa, tidak dipaksa, inilah syarat-syarat yang menjadi dasar penuntutan. Sedangkan maqdzuf (orang yang dituduh berzina) *fuqaha'* sepakat bahwa diantara syaratnya adalah: islam, akal sehat, baligh, merdeka (bukan budak), *iffah* (menjauhi perbuatan zina). Kelima syarat tersebut harus terdapat pada tertuduh agar hukuman qadzaf dapat dilaksanakan terhadap penuduh (atas tuduhan dustanya).²⁶

Hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah didera sebanyak 80 kali, Jika yang menuduh orang merdeka sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nur: 4;

²⁵ Ahmad Azani, "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2012, hlm. 26.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-5, 1993, hlm. 38.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (QS. al-Nur : 4)²⁷

Sedangkan jika yang menuduh hamba sahaya (budak) maka hukumannya didera atau dijilid empat puluh kali. Firman Allah swt (QS. Al-Nisa' : 25)

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾



Artinya: Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nisa' : 25)²⁸

Orang yang menuduh berbuat zina dapat bebas dari *had* (hukuman) *qadzaf* apabila terjadi salah satu dari keadaan di bawah ini :²⁹

- a. Penuduh dapat mengemukakan empat orang saksi, bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina. Syarat saksinya adalah laki-laki, adil,

²⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm. 123.

²⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm. 93.

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-5, 1993, hlm. 20.

memberikan kesaksian yang sama tentang tempat berzina, waktu dan cara melakukannya. Dasar hukumnya adalah QS. al-Nur: 4.

- b. Dengan *li'an* (لعان) jika suami menuduh isteri berzina tanpa mengemukakan empat orang saksi. *Li'an* adalah sumpah suami yang menuduh isterinya berzina. Sumpah tersebut diucapkan empat kali diantara lain ucapannya "Demi Allah istri saya telah berzina dengan si Fulan lalu pada ucapan sumpah yang kelima ditambah dengan kalimat "Saya bersedia dikutuk Allah bila saya berdusta". Firman Allah swt QS. Al-Nur: 6-7;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (QS. Al-Nur: 6-7).³⁰

- c. Orang yang dituduh memaafkan orang yang menuduh.
- d. Bila yang dituduh membenarkan tuduhan penuduh (pengakuan si pelaku).

³⁰ Departemen Agama RI, Op.cit. hlm. 123.

Hikmah Qadzaf

Adapun hikmah larangan qadzaf menurut Ahmad Hanafi di antaranya adalah :³¹

- a. Orang lebih berhati-hati dan sembarangan berbicara apalagi melemparkan tuduhan berzina sebelum ada bukti tertentu.
- b. Terjaga keharmonisan dalam pergaulan diantara sesama manusia, karena tidak ada permusuhan diantaranya.
- c. Pembohong merasa jera dan menyadari perbuatan yang tidak terpuji
- d. Akan terjaga dari tuduhan yang tidak benar

Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan atau pencemaran nama baik menjadi tiga :

1. *Ad'dzammu*: penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. *Al-Qadhu*: segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu
3. *At-Tahqir*: setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan³²

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-5, 1993, hlm. 38.

³² Abdul Rahman al-Maliki, *Sistem Sanski dalam Islam*, Terj Syamsudin, Cet. 1, Beirut: Muasyasyah Al- kutub, 1989, hlm. 12.

Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model penghinaan :

1. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
2. *Lamzu*: adalah menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
3. *Tanabuz*: adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.³³

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.³⁴

Dalam firman Allah yang lain yaitu QS. Al-Hujurat: 11;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

³³ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, 1996, hlm. 428.

³⁴ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hlm. 141.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujurat: 11)³⁵

Tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana Islam termasuk *jarimah ta'zir*, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah* yang tidak ditentukan oleh hukum syari'at.³⁶ *Ta'zir* dalam bahasa Arab adalah diambil dari kata *mashdar* (kata dasar) dari '*azzara*, yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, lafadz '*azzara* itu juga dapat berarti menguatkan, memuliakan, membantu.³⁷ Definisi *ta'zir* menurut Imam al-Mawardi, diartikan hukuman yang bersifat pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.³⁸ Dan untuk hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda beda, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula dipenjara lebih lama.³⁹

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa tidak ada batas tertinggi yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara seperti *ta'zir*, dan hal itu diserahkan kepada *ijtihad* hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi.

³⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 1265.

³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 299.

³⁷ A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Cet II., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 159.

³⁸ Ahmad Wardi Muslikh, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 19.

³⁹ Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, hlm. 236.

Jadi *ta'zir* dapat disimpulkan, yaitu hukum untuk sebuah perbuatan yang dilarang oleh Islam yang kadar ketentuannya jelas tentang hukumnya tidak diperinci, dan hukumannya tersebut diserahkan kepada penguasa atau pemimpin untuk mendidik warga negaranya.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR
68/PID.SUS/2014/PT YYK TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

1. Sejarah Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada awalnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang, namun setelah terbit Undang Undang Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang meliputi wilayah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan operasionalnya. Didalam operasionalnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami beberapa perpindahan tempat, pada awal berdirinya Pengadilan Tinggi Yogyakarta beralmat di Jln. Trikora No. 1980 pada tanggal 29 Juli tahun 1980 dengan Ketua Pengadilan Tinggi pertama kali yaitu beliau bapak Surono S,H kemudian pada tanggal 27 Mei 1986 kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipindah ke Jln. Janturan (Jln. Prof. DR. Soepomo No.10) pada saat gempa menguncang Yogyakarta tahun 27 Mei 2007 kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta rusak parah untuk sementara kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta menumpang di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beralamatkan di Jln. Kapas No. 10 untuk melakukan semua kegiatannya kemudian setelah gedung baru selesai dibangun maka pada tanggal 1 juli 2010 Pengadilan Tinggi Yogyakarta menempati gedung baru untuk melaksanakan semua Tugas Pokok dan Fungsinya

yang beralamatkan di Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.¹

2. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok Pengadilan Tinggi lainnya yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk, sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana, disamping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Disamping itu juga melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta Pembinaan teknis Pengadilan.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada umumnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan maupun petunjuk-petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung RI. Adapun dalam pelaksanaan tugas dimaksud ditemukan adanya hambatan-hambatan yang telah diusahakan untuk diatasi, namun demikian masih terdapat pelaksanaan tugas atau program yang belum terselesaikan.

¹ Data mengenai profil Pengadilan Tinggi Yogyakarta diperoleh dari www.pt-yogyakarta.go.id diakses pada tanggal 13 Maret 2015 pukul 6.11 WIB.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta meliputi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Madya, yaitu :Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo. Luas wilayah 3.185,77 km² terdiri dari hutan, rawa, sungai, danau, gunung, air, pantai, tanah, dll

Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta terdapat 5 Satuan Kerja :

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Pengadilan Negeri Wates
3. Pengadilan Negeri Wonosari
4. Pengadilan Negeri Sleman
5. Pengadilan Negeri Bantul ²

3. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai visi

"TERWUJUDNYA PERADILAN UMUM YANG AGUNG"

b. Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

1. Supremasi hukum yang mandiri, efektif dan efisien
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi peradilan umum

² Data mengenai profil Pengadilan Tinggi Yogyakarta diperoleh dari www.pt-yogyakarta.go.id diakses pada tanggal 13 Maret 2015 pukul 6.11 WIB.

4. Meningkatkan kualitas hakim dan pegawai
5. Meningkatkan sarana dan prasarana
6. Meningkatkan pengawasan³

4. Tugas dan Wewenang Hakim

Tugas dan wewenang hakim tertuang dalam pasal 5 ayat (1, 2, 3)

UU No. 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*. yang berbunyi:⁴

Ayat 1):

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maksud dari pasal tersebut adalah hakim sebagai *sense of justice of the people*.

Ayat 2):

Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Ayat 3):

Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Telah disahkannya UU No.48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman* telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No.4 tahun 2004. Menurut Muchsin, alasan utama disusunnya undang-undang baru ini karena UU No.4 Tahun 2004 secara substansi dinilai kurang dalam mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya cukup

³ Data mengenai profil Pengadilan Tinggi Yogyakarta diperoleh dari www.pt-yogyakarta.go.id diakses pada tanggal 13 Maret 2015 pukul 6.11 WIB.

⁴ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

luas ini, hal lain yang mendorong adanya perubahan undang-undang tersebut adalah adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 34 UU No.4 Tahun 2004, karena setelah pasal dalam undang-undang yang di-review tersebut diputus bertentangan dengan UUD, maka saat itu juga pasal dalam undang-undang tersebut tidak berlaku, sehingga untuk mengisi kekosongan aturan/hukum, maka perlu segera melakukan perubahan pada undang-undang dimaksud.⁵

Hakim mengedepankan keadilan hukum umum daripada mempertimbangkan, menggali atau menemukan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Padahal hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pembuat atau pembentuk hukum (*Judge made Law*). Hukum yang dibentuk oleh hakim bukanlah undang-undang atau berdasar pada undang-undang. Hukum yang dibentuk oleh hakim bukan hanya putusan-putusan yang hanya corong undang-undang, tetapi benar-benar esensial hukum yang sebenarnya dengan menggali dan menemukan hukum dari berbagai sumber, termasuk hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang kemudian ditransformasikan ke dalam putusan-putusannya. Pelaksanaan peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategis dan sentral dari kekuasaan kehakiman,

⁵ Muchsin, 2009, “Kekuasaan Kehakiman Pasca pengesahan Undang-undang No. 48 Tahun 2009”, dilihat melalui <http://dilmil.balikipapan.go.id/artikel.phpview=view&desc=content&id=162>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 pukul 10.05 WIB.

selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Di sisi yang lain, juga akan berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggung jawab kelembagaan kekuasaan kehakiman. Semakin berkualitas putusan yang dihasilkan hakim, maka peran lembaga yudikatif ini akan semakin dirasakan kontribusi dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

B. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 68/PID.SUS/2014/PT YYK.

Adapun ringkasan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 68/PID.SUS/2014/PT YYK adalah sebagai berikut:⁶

1. Identitas terdakwa :

Nama lengkap terdakwa adalah Tommy Virgananda, lahir di Yogyakarta 15 September 1975, berusia 37 tahun. Berjenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, berdomisili di Tegalgendu No.33 RT.52 RW. 11 Kelurahan Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. Terdakwa beragama Islam dan bekerja dalam bidang swasta.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut melalui surat Nomor Register Perkara: PDM-131/YOGYA/11/2013 mendakwa Tommy Virgananda dengan 2 dakwaan sebagai berikut:⁷

a. Kesatu

Terdakwa bersama-sama dengan Saksi (yang perkaranya telah diputus oleh PN Yogyakarta), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti pada bulan September 2010 bertempat di Jalan Sunaryo NO. 14 Kotabaru Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Terdakwa dengan sengaja dan

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 68/PID.SUS/2014/PT YYK, hlm.1.

⁷ Ibid, hlm.3.

tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dilakukan dengan cara mencantumkan hubungan menikah melalui akun facebook dengan Saksi yang merupakan istri pelapor.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat (1) KUHP ATAU.

b. Kedua

Terdakwa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun orang lain. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2014 Nomor Register Perkara : PDM /YOGYA/Euh.2/03/2014 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:⁸

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)* dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Flasdick merk DT 101 G2 Warna Biru yang didalamnya berisi tentang Screen Shot / Tampilan Dinding dan Info facebook atas nama Hilda Puspita dan Screen Shot halaman facebook atas nama TOMMY VIRGANANDA;
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy *Screen Shot* dinding dan info facebook atas nama Hilda Puspita ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Screen Shot halaman facebook atas nama TOMMY VIRGANANDA ;

⁸ Ibid, hlm. 4.

- d. 1 (satu) Bendel fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 411/Pdt.G/2010/PA.Smn, tanggal 08 Februari 2010 ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);⁹

4. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 30 April 2014, Nomor 30/Pid.Sus/2014/PN.Yk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :¹⁰

1. Menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “*Pencemaran nama baik melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah flasdisc merk DT 101 G2 warna biru yang didalamnya berisi tentang screen shot/tampilan dinding dan info facebook atas nama Hilda Puspita dan screen shot halaman facebook atas nama Tommy Virgananda;

⁹ Ibid, hlm. 5.

¹⁰ Ibid, hlm. 6.

- b. 3 (tiga) lembar fotocopy screen shot dinding dan info facebook atas nama Hilda Puspita;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy screen shot halaman facebook atas nama Tommy Virgananda;
 - d. 1 (satu) Bendel fotocopy salinan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 411/Pdt.G/2010/PA. Smn tanggal 08 Februari 2010;
5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).¹¹

5. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Setelah Pengadilan negeri Yogyakarta memberi putusan, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengajukan banding yang di proses di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Berdasarkan pemeriksaan dan berbagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberi Putusan sebagai berikut:¹²

- 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
- 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 April 2014 Nomor 30/Pid.Sus/2014/PN. Yk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

¹¹ Ibid, hlm. 7.

¹² Ibid, hlm. 7.

3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SENIN tanggal 4 Agustus 2014, oleh DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, EKO TUNGGUL PRIBADI, SH dan SUMARYANTO, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 5 AGUSTUS 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPARMi ENDANG SUTEBLISI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR: 68/PID.SUS/2014/PT YYK TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Dasar Pertimbangan Hukum dan Sanksi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Kewajiban hakim sebagaimana tersirat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 adalah sebagai '*sense of justice of the people*'. Maksud dari hal ini adalah hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasakeadilan masyarakat.¹

Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-undang) atas perkara-perkara di Pengadilan atau '*agent of conflict*'. Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam

¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1979, hlm. 5.

masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan.²

Pentingnya pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana untuk memenuhi keadilan sangat beralasan juga harus ada dan tertulis dalam putusannya karena ;

- a. Bahwa putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- c. Surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.³

Di dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah dari segi hukum (*yuridis*) dan dari segi non hukum (*non yuridis*). Hakim dalam memberikan putusan ada dua

² Henry Arianto, 2012, “Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”, dilihat dalam jurnal Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012.

³ Benecditus singgih, 2015, “Kajian atas Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik oleh Dokter (Berdasarkan Teori Efektifitas Hukum)”, dilihat dari <http://benedictussinggih.blogspot.co.id/2015/10/kajian-atas-kasus-pencemaran-nama-baik.html>.

pertimbangan, yaitu dari segi formil dan materiil. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertentu saja. Sehingga ia merupakan unsur tindak pidana dan materiil itu sendiri. sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materiil adalah melawan hukum dalam arti luas di mana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja. Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.⁴

Secara formil, maka teranglah bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang - undang atau perbuatan yang melanggar perintah di dalam undang undang, karena bertentangan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam undang - undang. Dari putusan dengan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 68/PID.SUS/2014/PT YYK yang dijadikan pertimbangan ada dua yaitu:⁵

1. Pertimbangan Formil

Unsur formil dari putusan Nomor Perkara: 68/PID.SUS/2014/PT. YYK meliputi :

a. Perbuatan manusia

Unsur perbuatan manusia dalam putusan ini adalah perbuatan terdakwa mencantumkan hubungan menikah dengan Saksi yang merupakan istri dari Pelapor.

⁴ Roeslan Saleh, Opcit. Hlm. 8

⁵ Putusan PT Yogyakarta Nomor : 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik

b. Melanggar peraturan pidana

Sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, apabila tidak ada peraturan pidananya.

Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan mencantumkan status hubungan menikah dengan Saksi yang merupakan istri pelapor, tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik sudah diatur dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁶

c. Diancam dengan hukuman

Dalam pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)* hukuman maksimal yang diberikan adalah pidana penjara 6 tahun dan denda maksimal 1 milyar rupiah.⁷

d. Dilakukan oleh orang yang bersalah

Unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat

⁶ Ibid, hlm. 3.

⁷ UU ITE Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*

kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.⁸

- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Dari segi hukum (*yuridis*), diketahui bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan di persidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Terdakwa Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu dalam pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung di dalam dalam pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)* tersebut yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik⁹.

⁸ Putusan PT Yogyakarta, Op. Cit. hlm. 3.

⁹ Ibid, hlm. 4.

Apa yang dilakukan oleh terdakwa juga telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 310 KUHP yaitu:

- a. Dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud agar diketahui umum (tersiar).
- b. Tanpa hak atau izin.
- c. Obyek atau sasarannya adalah orang
- d. Akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

Terdakwa dalam hal ini, sengaja memasang status hubungan menikah di media sosial facebook yang jelas diketahui umum dengan Saksi yang merupakan istri dari Pelapor. Jelas terdakwa tidak mempunyai hak atau izin atas hal ini. Pelapor adalah orang yang memiliki perasaan dan ingin mendapat kehormatannya seperti orang lain. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan Pelapor secara materiil.

2. Segi Materiil

Selain melihat dari segi hukum (*yuridis*), sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa Majelis hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (*non yuridis*) agar diperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa. Pengadilan Tinggi berpendapat tujuan pidana adalah bukan untuk balas dendam tetapi bertujuan untuk mendidik / atau memberi pelajaran kepada pelaku tindak pidana.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga

perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Apa yang dilakukan oleh terdakwa secara materiil telah mencederai hukum yang hidup dalam masyarakat. Akibat perbuatan Terdakwa mencantumkan status hubungan menikah dengan saksi, mengakibatkan pelapor yang saat itu masih menjadi suami yang sah saksi merasa nama baiknya tercemar dan secara tidak langsung merasa terhina dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, didepan teman-teman saksi Pelapor yang melihat facebook saksi yang menikah dengan laki-laki lain yaitu Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tidak bisa diterima oleh Pelapor dan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi hakim dalam memberikan putusan kepada Terdakwa tidak hanya berdasar pertimbangan yuridis semata, melainkan juga melihat perspektif sosiologis dan psikologis dari diri Terdakwa . Hal ini terlihat dari pendapat Majelis Hakim pengadilan Tinggi yang berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa bukan bertujuan untuk balas dendam, namun lebih ke arah untuk memberikan pendidikan atau pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹⁰

Sanksi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT. YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,

¹⁰ Putusan PN Yogyakarta Nomor: 30/Pid.Sus/2014/PN.Yk, hlm. 6.

dalam segi normatif atau yuridis, hakim dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa, sangat tepat. Sebelum kasus ini dilakukan banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kasus ini telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dua dakwaan:¹¹

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi (yang perkaranya telah diputus oleh PN. Yogyakarta), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui secara pasti pada bulan September 2010 bertempat di Jalan Sunaryo NO. 14 Kotabaru Yogyakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar penghinaan atau pencemaran nama baik. Perbuatan Terdakwa Terdakwa ini sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kedua :

¹¹ Ibid, hlm. 1.

Terdakwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan kesatu, Terdakwa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun orang lain. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) KUHP.

Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2014 Nomor Register Perkara : PDM /YOGYA/Euh.2/03/2014 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : ¹²

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Virgananda bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)* dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

¹² Ibid, hlm. 4.

- 1) 1 (satu) buah Flasdisk merk DT 101 G2 Warna Biru yang didalamnya berisi tentang Screen Shot / Tampilan Dinding dan Info facebook atas nama Saksi dan Screen Shot halaman facebook atas nama Tommy Virgananda;
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy Screen Shot dinding dan info facebook atas nama Hilda Puspita ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Screen Shot halaman facebook atas nama Tommy Virgananda ;
- 4) 1 (satu) Bendel fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 411/Pdt.G/2010/PA.Smn, tanggal 08 Februari 2010 ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 30 April 2014, Nomor: 30/Pid.Sus/2014/PN.Yk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ¹³

1. Menyatakan terdakwa : Tommy Virgananda tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Pencemaran nama baik melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik”* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : *3 (tiga) bulan dan denda Rp.1.000.000,-*

¹³ Ibid, hlm. 5

(satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah flasdisc merk DT 101 G2 warna biru yang didalamnya berisi tentang screen shot/tampilan dinding dan info facebook atas nama Saksi dan screen shot halaman facebook atas nama Terdakwa;
 - 2) 3 (tiga) lembar fotocopy screen shot dinding dan info facebook atas nama Saksi;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy screen shot halaman facebook atas nama Terdakwa;
 - 4) 1 (satu) Bendel fotocopy salinan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 411/Pdt.G/2010/PA.Smn tanggal 08 Februari 2010;
 - 5) Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); ¹⁴

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2014 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 13.B/ Akta.Pid/201 4/PN. Yk. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2014. Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan

¹⁴ Ibid, hlm. 5.

permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2014 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 13a.B/Akta.Pid/2014/PN. Yk. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2014. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 26 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2014.¹⁵

Setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 April 2014, Nomor 30/Pid.Sus/2014/PN. Yk., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (3) Undang -undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)* juncto pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.¹⁶

Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

¹⁵ Loc. cit

¹⁶ Ibid, hlm. 6.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 April 2014 Nomor 30/Pid.Sus/2014/PN.Yk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan ;
- 2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk selebihnya;
- 3) Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan Terdakwa, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).¹⁷

¹⁷ Putusan PT Yogyakarta, Op. Cit. hlm. 7.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum dan Sanksi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik menurut Hukum Islam.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk dapat memberikan kemaslahatan dan mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an QS. Al-Anbiya: 107;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “ Dan tiadalah Kami mengutuskanmu , melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya:107)¹⁸

Setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai rahmatan lil 'Alamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Imam al-Ghazali merumuskan tujuan syari'at (*Maqashid Asy-Syar'iyah*) dengan lima prinsip perlindungan, yaitu perlindungan terhadap keyakinan agama (*Hifzh Ad-Din*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifz An-Nafs*), perlindungan terhadap pikiran (*Hifzh An-'Aql*),

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Atlas, 1998, hlm. 331.

perlindungan terhadap keturunan (*Hifzh An-Nasl*), dan perlindungan terhadap harta benda (*Hifzh Al-Mal*). Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan (*Maslahat*) dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan (*Mafsadat*). Menolak kemaslahatan adalah kemadharatan.¹⁹

Tujuan *syar'i* ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan hadits. Dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yakni agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.

Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, jika ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* jika ia tidak dapat memelihara kelima unsur itu dengan baik. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia.²⁰ Tuntutan kebutuhan bagi manusia bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat itu adalah *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier).

¹⁹ Al-Gazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut: Dar Ihya' at-turats al-
'Arobi, hlm. 287.

²⁰ Mahmud Bilal Mahran, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah*, hlm 624-625.

Memelihara kehormatan nama baik ditinjau dari tingkat kepentingan dan kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharuskannya saling tolong-menolong dalam kebaikan, bersikap sopan santun terhadap semua orang, selalu berkata jujur, dan berakhlak mulia. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi kehormatan akan terancam.
2. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dilarangnya menghina orang lain dan ditetapkan hukuman oleh ulil amri melalui Ta'zir, untuk melindungi kehormatan nama baik manusia. Apabila ini tidak diperhatikan maka, seseorang akan kesulitan mencari keadilan.
3. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menjunjung martabat manusia, selalu menghargai manusia, hal ini erat kaitannya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi kehormatan secara langsung.

Abdul Rahman al-Maliki dalam bukunya Sistem Sanksi dalam Islam membagi penghinaan atau pencemaran nama baik menjadi 3 sebagai berikut:

- a. *Al-Zammu*: penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. *Al-Qadhu*: segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

c. *Al-Tahqir*: setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan²¹

Berdasarkan definisi dari Rahman Al-Maliki di atas maka perbuatan Terdakwa bisa dikategorikan sebagai *Al-Qadhu* karena yang dilakukan Tommy bukan berbentuk sindiran ataupun celaan, namun menuliskan hubungan menikah dengan istri pelapor, yang secara tidak langsung merendahkan harga diri pelapor sebagai suami.

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dll. Hukum pidana Islam memberikan aturan yang mengacu pada Al-Qur'an bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *ta'zir* yang

²¹ Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Terj Samsudin, Semarang: CV Toha Putra. 1989.

pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan *yudikatif*. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama dan prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemadhorotan* (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i* (nas).²² Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.

Ta'zir sendiri merupakan hukuman paling ringan diantara jnis-jenis hukuman yang lain.²³ Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.²⁴ *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharotan* (bahaya).

Jarimah dalam istilah hukum di Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana, dan dalam Islam setiap perbuatan jarimah harus dihukum demi

xii. ²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.

250. ²³ Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hlm. 497

tegaknya keadilan dan kemaslahatan umat. Hukum tersebut diberikan agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi, selain itu juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak meniru perbuatan tersebut .

Sebelum hakim menjatuhkan pidana perlu untuk mempertimbangkan berbagai hal, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga hukuman tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi para terdakwa maupun korban.²⁵ Di samping itu, penegakkan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa menghindari kesulitan harus didahulukan dari mendatangkan kemaslahatan”.

Pelaku pelanggaran terhadap tindak pidana dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus; Unsur Khusus untuk Jarimah penghinaan adalah :

1. Pelaku berakal
2. Sudah mencapai usia baligh
3. Motivasi kejahatan disengaja
4. Berniat untuk menghina korban²⁶

Adapun unsur-unsur umum jarimah yaitu

1. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash)
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum)
3. Unsur moril (pelakunya mukalaf)

²⁵ Rahmad Hakim, 2013, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Solo: Pustaka Setia, hlm. 140-141.

²⁶ Sayid Sabiq, 1987, *Fikih Sunnah (Fiqhus Sunah) 13*, Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 75.

Ditinjau dari niatnya penghinaan ada dua bagian

1. Dengan sengaja melawan hukum yaitu seseorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terhina. Seperti seorang yang sengaja menghina orang lain dengan kata-kata “bodoh” dengan tujuan menghina.
2. Dengan tidak sengaja, menurut Abdul Qodir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut, tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum,²⁷ maksudnya adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk menghina orang lain.

Ta'zir ditinjau dari tindakannya (perbuatan) dibedakan ke dalam tiga kelompok.²⁸

1. Ta'zir atas maksiat
2. Ta'zir atas kemaslahatan umum (maslahat al mursalah)
3. Ta'zir atas pelanggaran-pelanggaran

Dalam *had* pencemaran nama baik bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, maka dapat dikategorikan kepada ta'zir atas pelanggaran-pelanggaran (*ta'zir 'ala al-mukhallaf*), karena perbuatan tersebut adalah “melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama baik, atau merendahkan derajat orang

Hukuman *ta'zir* adakalanya dengan ucapan, seperti penghinaan, peringatan, dan nasehat; dan terkadang dengan perbuatan sesuai dengan

²⁷ Abdul Qadir Audah, 2007, *At-Tasyri, Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz I, Jakarta: PT. Kharisma, hlm. 204.

²⁸ S. Praja Juhaya, 1991, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 29.

kondisi yang ada, seperti *ta'zir* juga dilakukan dengan pukulan, kurungan, pasungan, pengasingan, dan skors. Pemberian hak penentuan *ta'zir* kepada penguasa itu dimaksudkan agar mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib, tentram, dan damai. Dalam hukum Islam suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya,

1. Rukun *Syar'i* (yang berdasarkan syara') atau disebut unsur formal, yaitu adanya nash syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
2. Rukun *Maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya pidana yang dilakukan.
3. Rukun *Adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

. Karena Terdakwa sudah *aqil baliq* dan memiliki niat untuk melakukan perbuatan pencemaran nama baik. Niat disini diartikan sebagai melakukan sesuatu disertai dengan tindakan.²⁹ Apa yang dilakukan Tommy telah memenuhi unsur dalam hukum pidana Islam, bahwa unsur-unsur *jarimah* meliputi:

- 1) Unsur formil, yakni adanya *nash* yang melarang, dengan disertai dengan ancaman hukuman.
- 2) Unsur materiil, yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan aktif maupun pasif.

²⁹ Nasr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowaid Fiqhiyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Styawan, *Qowaid Fiqhiyah*, Amzah: Jakarta: 2009, hlm. 33.

- 3) Unsur moril, yakni pembuat, adalah seorang *mukallaf*³⁰, yang dapat dimintai pertanggungjawaban

Tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana Islam termasuk *jarimah ta'zir*, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah* yang belum ditentukan oleh hukum syari'at.³¹ Bisa dikenakan hukuman *ta'zir* dalam dua bentuk yaitu:

a. Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rosulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki maki orang lain dengan menghina ibunya. Maka Rosulullah saw berkata, "*Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan menjelek jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihindari sifat sifat masa jahiliyah*".³²

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil.

³⁰ Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil balig (dewasa), sehingga orang tersebut mengerti tentang hukum syari'at islam dalam semua tindak dan perbuatannya. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet-6, 1996, hlm. 3.

³¹ Ahmad Hanafi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm, 299.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, hlm.

Hukuman ini dicantumkan dalam al Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang dikhawatirkan berbuat nusyuz.

b. Hukuman Denda (*tahdid*)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.

Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya Dalam kasus Terdakwa vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah pidana kurungan penjara 2 bulan dan denda sebesar 1 juta rupiah

Menurut Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang dimaksud dengan pidana penjara menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah , masjid, maupun di tempat lainnya. Sedangkan hukuman penjara dalam syariat islam , terbagi menjadi dua bagian yaitu : ³³

1. Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan

³³ Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996 , hlm. 162.

untuk jarimah penghinaan, penjual khamar, pemakan ribah, melanggar kehormatan bulan suci ramadhan dengan berbuka puasa pada siang hari tanpa udzur. Dan lain sebagainya.

Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahnyanya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama. Sedangkan menurut Imam Az-Zaila'I sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua bulan atau tiga bulan atau kurang atau lebih.

Adapun batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Sedangkan Imam Ibnu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengah bulan, atau empat bulan tergantung kepada kadar harta yang di tahannya. Adapun batas terendah dari hukuman penjara sebagai *ta'zir* juga tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti Imam Al-Mawardi, batas terendah hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi menurut Ibnu Qudamah tidak ada ketentuan yang pasti, melainkan diserahkan kepada *ijtihad* imam (*ulil amri*)

2. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus-menerus sampai orang

yang terhukum mati, atau ia sampai bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 67/PID.SUS/2014/PT YYK tentang tindak pidana pencemaran nama baik, sanksi hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum pidana Islam , yaitu dikenakan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara dan denda yang batas tertinggi dan terendahnya diserahkan kepada ulil amri dalam menentukannya. Sedangkan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut uraian tersebut di atas termasuk kepada kategori penjara terbatas, karena dibatasi jangka waktunya.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan ini:

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengambil putusan Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT. YYK melihat dari segi hukum (*yuridis*) dan non hukum (*non yuridis*). Dari segi hukum (*yuridis*) dilihat berdasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan, yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Dari segi non hukum (*non yuridis*) seperti pertimbangan Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk balas dendam namun untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada terdakwa. Dalam Putusan Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT. YYK Tommy Virgananda dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan*

Transaksi Elektronik (ITE). Sanksi dalam putusan Nomor:68/PID.SUS/2014/PT. YYK dengan terdakwa Tommy Virgananda adalah pidana penjara 2 bulan dan denda sebesar 1 juta Rupiah apabila tidak membayar denda maka digantikan pidana kurungan 1 bulan. Sanksi putusan di Pengadilan Tinggi ini lebih ringan dari sanksi yang diputuskan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan sanksi putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk terdakwa Tommy Virgananda terlalu berat, sehingga putusan yang awalnya 3 bulan penjara dikurangi menjadi 2 bulan penjara. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberi keringanan karena memperimbangkan bahwa tujuan dari hukuman ini sebagai sarana untuk pendidikan bukan balas dendam.

2. Dalam hukum Islam suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi atau hukuman jika telah memenuhi unsur-unsur jarimah yang meliputi unsur formil, materiil dan moril. Unsur formil, yakni adanya *nash* yang melarang, dengan disertai dengan ancaman hukuman. Unsur materiil, yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan aktif maupun pasif. Unsur moril, yakni pembuat, adalah seorang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan

Nomor:68/PID.SUS/2014/PT. YYK termasuk dalam *Jarimah ta'zir* yang penentuan hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri atau pihak yang berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Hukuman *ta'zir* bisa dalam 2 bentuk, yaitu hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) atau Peringatan dan hukuman denda. Hukuman penjara dalam Islam terbagi menjadi hukuman penjara tidak terbatas dan hukuman penjara terbatas. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- apabila tidak membayar denda, diganti dengan penjara selama 1 bulan.

B. SARAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan Nomor:68/PID.SUS/2014/PT. YYK seharusnya mencantumkan aspek yang meringankan dan memberatkan yang dapat membantu hakim dalam menghasilkan putusan yang terbaik.
2. Hakim perlu mendalami motif (alasan) yang sebenarnya dari terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan Tommy Virgananda.

3. Perlu sikap yang bijaksana dalam pemanfaatan teknologi informasi, baik melalui media sosial, *email*, *website*, blog, dll. Manfaatkan media tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berusaha untuk selalu menyebarkan informasi yang bersifat positif, bukan sebaliknya memberikan informasi yang negatif yang berdampak kurang baik di masyarakat.
4. Perlu kehati-hatian untuk menyampaikan atau menyebarluaskan Informasi yang belum tentu benar, selalu crosscek terlebih dahulu mengenai kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Mukhatashar Ihya' Ulumuddin*, Cet. 1, Beirut: Muasyasyah Al- kutub, 1990.
- Abullah bin Jarullah, *Awas Bahaya Lidah*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Abdul Qadir Audah, 2007, *At-Tasyri, Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz I, Jakarta: PT. Kharisma
- Abdul Rahman al-Maliki, *Sistem Sanski dalam Islam*, Terj Syamsudin, Cet. 1, Beirut: Muasyasyah Al- kutub, 1989.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet-6, 1996
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Al-Gazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut: Dar Ihya' at-turats al-'Arobi
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- An-Nawawi, *Al-Adzkar*, terj. M. Tarsi Hawi, Bandung: Pustaka Ma'arif, 1984.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Atlas, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996
- Hs, Fahrudin, *Ensiklopedi Al Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mahmud Bilal Mahran, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah*
- Moeljatno, *"Kitab Undang-undang Hukum Pidana"* . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Musthafa Al-'Adawi. *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'minin* Terj.Salim Bazemool, Taufik Damas. Muhammad Arifyanto, Jakarta: PT.Alma'arif, 2005.

- Nasr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowaid Fiqhiyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Styawan, *Qowaid Fiqhiyah*, Amzah: Jakarta: 2009
- O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Indonesia Against Injustice, Jakarta: 2010.
- Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 68/PID.SUS/2014/PT YYK.
- Rahmad Hakim, 2013, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Solo: Pustaka Setia.
- Robert Mirsal, *Teori Pergerakan Sosial*, Jakarta: Resist Book, 2005.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II, Dar al-Fikr*, Beirut, cet II, 1990.
- Sayid Sabiq, 1987, *Fikih Sunnah (Fiqhus Sunah) 13*, Bandung: Al-Ma'arif.
- S. Praja Juhaya, 1991, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995.
- Sudarto, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- UU ITE Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid . Jakarta: Rabbani Press, 2000.

Skripsi

- Ahmad Azani, “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2012.
- Arifin, “*Pencemaran Nama Baik menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2009.
- A. Vebriyanti Rasyid, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar: 2013.

Dian Sucianti Anggraeni, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media elektronik (Studi Kasus Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar: 2015.

Jurnal

Henry Arianto, 2012, “*Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*”, dilihat dalam jurnal Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012.

Internet

Benecditus singgih, 2015, “*Kajian atas Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik oleh Dokter (Berdasarkan Teori Efektifitas Hukum)*”, dilihat dari <http://benedictussinggih.blogspot.co.id/2015/10/kajian-atas-kasus-pencemaran-nama-baik.html>

http://prezi.com/vddmcub_-ss_/sosial-media-definisi-fungsi-karakteristik/ diakses pada tanggal 2 Agustus 2015 pukul 18.00 WIB.

Muchsin, 2009, “*Kekuasaan Kehakiman Pasca pengesahan Undang-undangn No. 48 Tahun 2009*”, dilihat melalui http://dilmil_balikpapan.go.id/artikel.phpview=view&desc=content&id=162, diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 pukul 10.05 WIB.

Vandi Syahputra, “*Stop Bungkam Kelompok Kritis*”, <http://www.koran.padek..co/read/detail/36265.html> diakses pada tanggal 16 November 2015 Pukul 07.55 WIB

www.dewijforever.blogspot.com/2011/09/hukum-qadzaf.html. diakses pada 25 April 2015 pukul 16.35 WIB

wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian, pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 07.30 WIB.

Web resmi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. www.pt-yogyakarta.go.id diakses pada tanggal 13 Maret 2015 pukul 6.11 WIB.



P U T U S A N

Nomor 68/PID.SUS/2014/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **TOMMY VIRGANANDA** ;

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun/ 15 September 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Tegalgendu Nomor 33 RT.52 RW.11 Kelurahan
Prenggan, Kotagede, Yogyakarta;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Juni 2014, Nomor 68/PID.SUS/2014/PT YYK. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Membaca salinan resmi dan surat-surat yang lain serta salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 April 2014 Nomor 30/Pid.Sus/2014/ PN.Yk. atas nama Terdakwa TOMMY VIRGANANDA ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Januari 2014, Nomor Register Perkara : PDM-131/YOGYA/11/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa TOMMY VIRGANANDA bersama sama dengan HILDA PUSPITA (yang perkaranya telah diputus oleh PN Yogyakarta), pada hari dan tanggal

Halaman 1 dari 8 perkara Nomor 68/PID.SUS/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang udah tidak dapat diketahui secara pasti pada bulan September 2010 bertempat di Jalan Sunaryo NO. 14 Kotabaru Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Terdakwa **sebagai orang yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar penghinaan dan atau pencemaran nama baik**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa TOMMY VIRGANANDA pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 23 September 2010 saksi Drs. Yana Karyana, M.Si, yang pada saat itu masih menjadi suami sah dari HILDA PUSPITA (saksi), melihat dan mengetahui akun facebook istrinya (saksi) dengan nama facebook HILDA PUSPITA mencantumkan status hubungan menikah dengan seorang laki-laki lain yang bernama Tommy Virgananda (Terdakwa), Terdakwa mempunyai facebook bernama TOMMY VIRGANANDA mengaku telah mencantumkan status hubungan menikah dengan HILDA PUSPITA dengan cara melakukan konfirmasi (menyetujui) permintaan hubungan menikah yang dikirim oleh Terdakwa yang mempunyai facebook dengan nama Tommy Virgananda dan sdr. HILDA PUSPITA mencantumkan facebooknya dengan status menikah dengan Terdakwa tersebut hanya iseng dan main-main saja.

Akibat perbuatan Terdakwa mencantumkan status hubungan menikah dengan saksi HILDA PUSPITA tersebut mengakibatkan saksi Drs. Yana Karyana, M.Si. pada saat itu masih menjadi suami yang sah saksi HILDA PUSPITA merasa nama baiknya tercemar dan secara tidak langsung merasa terhina dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, didepan teman-teman saksi Drs. Yana Karyana, M.Si yang melihat facebook Hilda Puspita yang menikah dengan laki-laki lain yaitu Terdakwa (Tommy Virgananda), selain itu didalam pekerjaannya saksi Drs. Yana Karyana, M.Si yang juga sebagai dosen dan pemilik Lembaga Belajar SSC Intersolusi merasa nama baiknya dicemarkan karena yang diketahui oleh teman-teman kerja dan kerabat Drs. Yana Karyana, M.Si mengetahui bahwa saksi Hilda Puspita menikah dengan saksi Drs. Yana Karyana, M.Si bukan Tommy Virgananda (Terdakwa).

Perbuatan Terdakwa Tommy Virgananda sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Tommy Virgananda pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan kesatu, Terdakwa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Tommy Virgananda pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 23 September 2010 saksi Drs. Yana Karyana, M.Si, yang pada saat itu masih menjadi suami sah dari saksi HILDA PUSPITA, melihat dan mengetahui akun facebook istrinya dengan nama jejaring sosial facebook HILDA PUSPITA mencantumkan status hubungan menikah dengan seorang laki-laki lain yang bernama Tommy Virgananda (Terdakwa), Terdakwa mengaku telah mencantumkan status hubungan menikah dengan HILDA PUSPITA dengan cara melakukan konfirmasi (menyetujui) permintaan hubungan menikah yang dikirim oleh Terdakwa (TOMMY VIRGANANDA) yang mempunyai facebook dengan nama Tommy Virgananda dan saksi HILDA PUSPITA mencantumkan facebooknya dengan status menikah dengan Tommy Virgananda (Terdakwa) tersebut hanya iseng dan main-main saja.

Akibat Terdakwa mencantumkan status hubungan menikah dengan saksi HILDA PUSPITA tersebut mengakibatkan saksi Drs. Yana Karyana, M.Si. pada saat itu masih menjadi suami yang sah merasa nama baiknya tercemar dan secara tidak langsung merasa terhina dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa (TOMMY VIRGANANDA) didepan teman-teman saksi Drs. Yana Karyana, M.Si.yang melihat facebook Hilda Puspita yang menikah dengan laki-laki lain yaitu Tommy Virgananda (Terdakwa), selain itu didalam pekerjaannya saksi Drs.Yana Karyana, Msi yang juga sebagai dosen dan pemilik Lembaga Belajar SSC Intersolusi merasa nama baiknya dicemarkan karena yang diketahui oleh teman-teman kerja dan kerabat Drs. Yana Karyana, M.Si. mengetahui bahwa Sdr. Hilda Puspita menikah dengan saksi Drs. Yana Karyana, M.Si. Bukan dengan Tommy Virgananda (Terdakwa).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) KUHP. -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2014 Nomor Register Perkara : PDM-

Halaman 3 dari 8 perkara Nomor 68/PID.SUS/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/YOGYA/Euh.2/03/2014 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TOMMY VIRGANANDA bersalah melakukan tindak pidana **pencemaran** nama baik melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMMY VIRGANANDA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk DT 101 G2 Warna Biru yang didalamnya berisi tentang Screen Shot / Tampilan Dinding dan Info facebook atas nama Hilda Puspita dan Screen Shot halaman facebook atas nama TOMMY VIRGANANDA;
 - 3 (tiga) lembar foto copy Screen Shot dinding dan info facebook atas nama Hilda Puspita ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Screen Shot halaman facebook atas nama TOMMY VIRGANANDA ;
 - 1 (satu) Bendel fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 411/Pdt.G/2010/PA.Smn, tanggal 08 Februari 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa TOMMY VIRGANANDA membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 30 April 2014, Nomor 30/Pid.Sus/2014/PN.Yk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa : **TOMMY VIRGANANDA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Pencemaran nama baik melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik"*** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMMY VIRGANANDA** tersebut dengan pidana penjara selama : ***3 (tiga) bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan;

- 3 Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisc merk DT 101 G2 warna biru yang didalamnya berisi tentang screen shot/tampilan dinding dan info facebook atas nama Hilda Puspita dan screen shot halaman facebook atas nama Tommy Virgananda;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy screen shot dinding dan info facebook atas nama Hilda Puspita;
 - 1 (satu) lembar fotocopy screen shot halaman facebook atas nama Tommy Virgananda;
 - 1 (satu) Bendel fotocopy salinan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 411/Pdt.G/2010/PA.Smn tanggal 08 Februari 2010;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 13.B/Akta.Pid/2014/PN.Yk. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 13a.B/Akta.Pid/2014/PN.Yk. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 26 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 30 Mei 2014 dan tanggal 2 Juni 2014 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Halaman 5 dari 8 perkara Nomor 68/PID.SUS/2014/PT YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 April 2014, Nomor 30/Pid.Sus/2014/PN.Yk., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya mempermasalahkan tentang tidak sebandingnya antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dimana ancaman pidana maksimal dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama adalah 3 (tiga) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi bertujuan untuk mendidik / atau memberi pelajaran kepada pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tanpa disertai memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana adalah menjadi kewenangan dari Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan motif dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai diatas maka pidana yang akan dijatuhkan menurut Pengadilan Tinggi adalah cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 April 2014, Nomor 30/Pid.Sus/2014/PN.Yk., harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 April 2014, Nomor 30/Pid.Sus/2014/PN.Yk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk selebihnya ;
 - Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **4 AGUSTUS 2014**, oleh **DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH** dan **SUMARYANTO, SH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 7 dari 8 perkara Nomor 68/PID.SUS/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **5 AGUSTUS 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPARMI ENDANG SUTEBLISI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EKO TUNGGUL PRIBADI, SH

DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum

2. SUMARYANTO, SH

Panitera Pengganti,

SUPARMI ENDANG SUTEBLISI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. David Faishal
TTL : Kendal, 17 Maret 1989
Alamat : Krompaan RT. 02/02 Kec. Gemuh, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Lajang / Belum Menikah
Tb : 175 cm
Bb : 65 kg
Cp : 085 713 096 603
Email : mdf.kendal@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Formal

(1994-2000) Lulus SDN 1 Krompaan

(2000-2003) Lulus SLTP NU 05 Gemuh

(2004-2007) Lulus SMAN 1 Gemuh

(2010-2015) S1-Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR : 68/PID.SUS/2014/PT.YYK

B. Non Formal

(2003-2004) Privat Komputer & Bahasa Inggris.

(2007-2010) Privat Maintenance / Perbaikan, Design, Pemrograman.

C. Kemampuan & Keterampilan

1. Menguasai Program Perkantoran & Perpajakan (Ms. Word, Excel, Power Point)
2. Menguasai Program Design Grafis (Coreldraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator)
3. Menguasai IT Maintenance & Troubleshooting
4. Mampu Bekerja Baik Secara Individu maupun Team
5. Menguasai Bahasa Inggris dan dapat berkomunikasi dengan baik

D. Pengalaman Kerja

1. PT. Propan Raya ICC.Semarang.

Sebagai Staff. Jabatan Maintenance Colour Produksi. November 2007- Januari 2010

Rincian pekerjaan :

- Pelaksana harian administrasi dan laporan produksi

2. PT. Jaskin CC Box Semarang.

Sebagai Staff. Jabatan Spv. Design. Januari 2010 - Maret 2015

Rincian pekerjaan :

- Pelaksana harian Produksi
- Approval design dengan konsumen

2. PT. Mitra Abadi Sejahtera Boxindo Semarang.

Sebagai Staff. Jabatan Manager Produksi. April 2015 – Desember 2015

Rincian Pekerjaan :

- Pengawas administrasi harian Produksi
- Pelaksana harian produksi
- Mengatur Sistem kerja Karyawan
- Bertanggung jawab atas semua proses kerja produksi